



BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG

PELAKSANAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, yang menyatakan Bupati sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);
10. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Gunung Mas.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perangkat Daerah pelaksana urusan Pemerintahan di bidang Persandian adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas.
6. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.

7. Keamanan informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan dan kenirsangkalan informasi.
8. Pengamanan Informasi adalah segala upaya, kegiatan, dan tindakan untuk mewujudkan Keamanan Informasi.
9. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
10. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
11. Pola Hubungan Komunikasi Sandi adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaringan komunikasi.
12. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan data, keabsahan data, integritas data serta otentifikasi data.
13. Layanan Keamanan Informasi adalah keluaran dari pelaksanaan 1 (satu) atau beberapa kegiatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Persandian dan yang memiliki manfaat.
14. Pengguna Layanan Keamanan Informasi yang selanjutnya disebut Pengguna Layanan adalah para pihak yang memanfaatkan Layanan Keamanan Informasi.
15. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang keamanan siber dan persandian.
16. Otoritas Sertifikat Digital Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat OSD Badan Siber Sandi Negara adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai Layanan Sertifikat Elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.
17. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE merupakan unit pelaksana teknis penyelenggara OSD Badan Siber Sandi Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. menciptakan harmonisasi dalam melaksanakan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
- b. meningkatkan komitmen, efektifitas, dan kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi; dan
- c. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, meliputi:

- a. penyusunan Kebijakan Pengamanan Informasi;
- b. pengelolaan sumber daya keamanan informasi;
- c. pengamanan Sistem Elektronik dan Pengamanan Informasi nonelektronik;
- d. penyedia Layanan Keamanan Informasi;
- e. penyediaan kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi melalui identifikasi dan analisis pola hubungan komunikasi sandi;
- f. penyelenggaraan operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi;
- g. pemanfaatan layanan sertifikat elektronik;
- h. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian di seluruh PD; dan
- i. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

Pasal 5

Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Daerah terdiri atas Bupati dibantu PD pelaksana urusan pemerintahan bidang persandian.

Pasal 6

- (1) Bupati memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan persandian yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) PD pelaksana urusan Pemerintahan bidang Persandian bertanggung jawab atas kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan bidang persandian sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) PD pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Persandian menyusun perencanaan penyelenggaraan Persandian sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan dituangkan dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), PD pelaksana urusan Pemerintahan Bidang Persandian menyusun Rencana Strategis PD yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Dalam rangka menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), PD pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran berdasarkan layanan urusan pemerintah bidang Persandian, disertai indikator kinerja program dan kegiatan, serta penganggaran penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Penyusunan Kebijakan Pengamanan Informasi

Pasal 9

Penyusunan Kebijakan Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan dengan:

- a. menyusun Rencana Strategis Pengamanan Informasi;
- b. menetapkan Arsitektur Keamanan Informasi; dan
- c. menetapkan aturan mengenai Tata Kelola Keamanan Informasi.

Pasal 10

- (1) Rencana Strategis Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, disusun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam melakukan penyusunan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN dan menunjuk PD pelaksana urusan Pemerintahan Bidang Persandian.
- (3) Dalam melakukan koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menunjuk PD pelaksana urusan Pemerintahan Bidang Persandian.

Pasal 11

- (1) Arsitektur Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Arsitektur Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Infrastruktur teknologi informasi;
 - b. Desain keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan; dan
 - c. Aplikasi keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan.
- (3) Dalam melakukan penyusunan arsitektur keamanan jaringan informasi PD pelaksana urusan Pemerintahan

bidang Persandian dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.

- (4) Arsitektur Keamanan Informasi yang telah disusun dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Arsitektur Keamanan Informasi dilakukan evaluasi oleh Bupati pada paruh waktu dan tahun terakhir atau sewaktu waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Aturan mengenai Tata Kelola Keamanan Informasi dalam Pasal 9 huruf c ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Aturan mengenai Tata Kelola Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. keamanan sumber daya teknologi informasi;
 - b. keamanan akses kontrol;
 - c. keamanan data dan informasi;
 - d. keamanan sumber daya manusia;
 - e. keamanan jaringan;
 - f. keamanan surat elektronik;
 - g. keamanan pusat data; dan/atau
 - h. keamanan komunikasi.
- (3) Dalam melakukan penyusunan atau aturan mengenai Tata Kelola Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PD pelaksana urusan Pemerintahan di bidang Persandian dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi

Pasal 13

- (1) PD pelaksana urusan bidang Persandian harus melakukan pengelolaan sumber daya keamanan informasi.
- (2) Pengelolaan sumber daya keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pengelolaan aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. pengelolaan sumber daya manusia; dan
 - c. manajemen pengetahuan.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Aset Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, melalui:
 - a. perencanaan kebutuhan;
 - b. pengadaan;
 - c. pemanfaatan dan penghapusan terhadap aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pengawasan dan pengendalian.
- (2) Aset Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mendeteksi, memproteksi, menganalisis, menanggulangi, dan/atau memulihkan insiden Keamanan Informasi dalam Sistem Elektronik.

Pasal 15

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui serangkaian proses sebagai berikut:
 - a. pengembangan kompetensi;
 - b. pembinaan karir; dan
 - c. pendayagunaan.
- (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan, melalui:
 - a. melalui tugas belajar, pendidikan dan pelatihan pembentukan dan penjenjangan fungsional, pendidikan dan pelatihan teknis, bimbingan teknis, asistensi, workshop, seminar dan kegiatan lainnya yang terkait pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang Keamanan Informasi;
 - b. mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh BSSN, pihak lainnya atau pemerintah daerah; dan
 - c. memenuhi jumlah waktu minimal seorang pegawai untuk meningkatkan kompetensi bidangnya.

- (4) Pembinaan karir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pembinaan jabatan fungsional di bidang keamanan informasi, dan
 - b. pengisian jabatan struktural sesuai standar kompetensi yang ditetapkan.
- (5) Pendayagunaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan agar seluruh sumber daya manusia yang bertugas di bidang keamanan informasi dapat bekerja sesuai dengan standar kompetensi pegawai yang ditetapkan.

Pasal 16

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional;
 - b. pendidikan dan pelatihan teknis sandi;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. kegiatan pengembangan kompetensi lain yang terkait dengan Persandian dan teknologi informasi serta bidang ilmu lainnya yang dibutuhkan.
- (2) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengembangan sumber daya manusia yang terkait dengan ilmu Persandian dan teknologi informasi serta bidang ilmu lainnya yang dibutuhkan.

Pasal 17

Sumber daya manusia yang sudah tidak melaksanakan tugas pada PD pelaksana urusan Pemerintah bidang Persandian harus disesuaikan kewenangannya, yaitu:

- a. pencabutan atau pemutusan hak akses terhadap informasi dan fasilitas informasi yang diamankan; dan
- b. pelaksanaan prosedur pengamanan (serah terima) materiil sandi.

Pasal 18

- (1) Manajemen pengetahuan pada Pasal 13 ayat (2) huruf c dilakukan oleh PD pelaksana urusan Pemerintah bidang Persandian untuk meningkatkan kualitas layanan keamanan informasi dan mendukung proses pengambilan keputusan terkait keamanan informasi.

- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan BSSN.

Bagian Keempat
Pengamanan Sistem Elektronik dan Pengamanan
Informasi Nonelektronik

Pasal 19

Pengamanan Sistem Elektronik dan pengamanan informasi nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilaksanakan oleh PD pelaksana urusan pemerintahan bidang persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri atas:

- a. penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan nirsangkal terhadap data dan informasi;
- b. penjaminan ketersediaan infrastruktur yang terdiri atas pusat data, jaringan intra pemerintah dan sistem penghubung layanan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik; dan
- c. penjaminan keutuhan, ketersediaan dan keaslian aplikasi.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan Pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, PD pelaksana urusan pemerintahan bidang persandian melakukan:
 - a. identifikasi;
 - b. deteksi;
 - c. proteksi; dan
 - d. penanggulangan dan pemulihan.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan analisis kerawanan dan risiko terhadap Sistem Elektronik.

- (3) Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan analisis untuk menentukan adanya ancaman atau kejadian insiden pada Sistem Elektronik.
- (4) Proteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui kegiatan mitigasi risiko dan penerapan perlindungan terhadap sistem elektronik untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik.
- (5) Penanggulangan dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan kegiatan penanganan yang tepat dan perbaikan terhadap adanya insiden pada Sistem Elektronik agar penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik berfungsi kembali dengan baik.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan Pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, PD wajib menggunakan Sertifikat Elektronik pada setiap layanan publik dan layanan pemerintahan berbasis elektronik.
- (2) Sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh BSSN dan/atau lembaga penyelenggara Sertifikasi Elektronik Dalam Negeri yang telah diakui.
- (3) Untuk mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam mendukung penyelenggaraan layanan pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), PD pelaksana urusan pemerintahan bidang persandian dapat menyelenggarakan Pusat Operasi Pengamanan Informasi sesuai standar yang ditetapkan oleh BSSN.
- (2) Pusat Operasi Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk pengamanan Sistem Elektronik dengan melakukan proses pengawasan, penanggulangan, dan pemulihan atas insiden keamanan Sistem Elektronik dengan memperhatikan aspek personel, proses pelaksanaan, dan ketersediaan teknologi.

Pasal 24

- (1) Pengamanan informasi nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilakukan pada tahapan pemrosesan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informasi nonelektronik.
- (2) Pengamanan informasi nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) PD pelaksana urusan pemerintahan Bidang Persandian melaksanakan audit Keamanan Informasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Perangkat Daerah Wajib mendukung dalam pelaksanaan kegiatan audit Keamanan Informasi di wilayah kerjanya.
- (3) Audit Keamanan Informasi meliputi audit keamanan Sistem Elektronik dan Audit Sistem Manajemen.
- (4) Audit Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penyediaan Layanan Keamanan Informasi

Pasal 26

- (1) Penyediaan Layanan Keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilaksanakan oleh PD pelaksana Urusan pemerintahan Bidang Persandian.
- (2) Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan untuk Pengguna Layanan yang terdiri atas:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas; dan
 - d. Pihak lainnya.

Pasal 27

Jenis Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), meliputi:

- a. identifikasi kerentanan dan penilaian risiko terhadap Sistem Elektronik;
- b. asistensi dan fasilitasi penguatan keamanan Sistem Elektronik;

- c. penerapan Sertifikasi Elektronik untuk melindungi Sistem Elektronik dan Dokumen Elektronik;
- d. perlindungan informasi melalui penyediaan perangkat teknologi keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi;
- e. fasilitasi sertifikasi penerapan manajemen pengamanan Sistem Elektronik;
- f. audit keamanan Sistem Elektronik;
- g. audit keamanan pelaksanaan sistem manajemen;
- h. literasi keamanan informasi dalam rangka peningkatan kesadaran keamanan informasi dan pengukuran tingkat kesadaran keamanan informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan publik;
- i. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dibidang keamanan informasi dan/atau persandian;
- j. pengelolaan pusat operasi pengamanan informasi;
- k. penanganan insiden keamanan sistem elektronik;
- l. forensik digital;
- m. perlindungan informasi pada kegiatan penting Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui teknik pengamanan gelombang frekuensi atau sinyal;
- n. perlindungan informasi pada aset/fasilitas penting milik atau yang akan digunakan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui kegiatan kontra penginderaan;
- o. konsultasi Keamanan Informasi bagi pengguna layanan; dan/atau
- p. jenis Layanan Keamanan Informasi lainnya.

Pasal 28

- (1) Dalam menyediakan Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, PD pelaksana urusan pemerintahan bidang Persandian melaksanakan manajemen Layanan Keamanan Informasi.
- (2) Manajemen Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan keamanan informasi kepada pengguna layanan.
- (3) Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penanganan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan/atau perubahan layanan keamanan informasi dari pengguna layanan.
- (4) Manajemen layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan berdasarkan manajemen Layanan Keamanan Informasi.

- (5) Dalam melaksanakan Layanan Keamanan Informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, PD pelaksana urusan pemerintahan bidang Persandian berkoordinasi dan berkonsultasi kepada PD pelaksana urusan Pemerintahan bidang Persandian di Provinsi dan Badan Siber dan Sandi Negara.

BAB III

PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI

Pasal 29

- (1) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menentukan jaring komunikasi internal Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk jaring komunikasi sandi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Penetapan pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilaksanakan melalui:

- a. identifikasi pola hubungan komunikasi sandi; dan
- b. analisis pola hubungan komunikasi sandi.

Pasal 31

Identifikasi pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf (a), dilakukan terhadap:

- a. pola hubungan komunikasi pimpinan dan pejabat struktural internal Pemerintah Daerah;
- b. alur informasi yang dikomunikasikan antar Perangkat Daerah dan Internal Perangkat Daerah;
- c. teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. kompetensi personel; dan
- e. Infrastruktur komunikasi.

Pasal 32

Analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf (b), dilakukan terhadap hasil identifikasi pola hubungan komunikasi sandi yang memuat:

- a. pengguna layanan yang akan terhubung dalam jaring komunikasi sandi;
- b. topologi atau bentuk atau model keterhubungan jaring komunikasi sandi antar Pengguna Layanan;

- c. perangkat keamanan teknologi informasi dan komunikasi, serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan; dan
- d. tugas dan tanggung jawab pengelola dan Pengguna Layanan.

Pasal 33

- (1) Hasil analisis pola hubungan komunikasi sandi pada Pasal 32 ditetapkan sebagai pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah oleh Bupati dalam bentuk keputusan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. entitas pengguna layanan yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi;
 - b. topologi atau bentuk atau model keterhubungan antar Pengguna Layanan;
 - c. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 - d. tugas dan tanggung jawab pengelola dan Pengguna Layanan.
- (3) Salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan ditembuskan kepada Kepala BSSN.

BAB IV

OPERASIONAL DUKUNGAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Pasal 34

- (1) Operasional dukungan Persandian untuk pengamanan informasi merupakan kegiatan operasional yang tidak terkait dengan Kriptografi namun mendukung terciptanya keamanan informasi.
- (2) Operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengamanan gelombang frekuensi (*jamming*);
 - b. kontra penginderaan; dan
 - c. penilaian Keamanan Sistem Informasi.
- (3) Pelaksana kegiatan operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi adalah Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang berada pada Bidang atau Seksi penyelenggara Persandian pada PD pelaksana urusan Pemerintahan bidang Persandian.
- (4) Pelaksanaan operasional dukungan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pengamanan gelombang frekuensi (*jamming*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, merupakan upaya pengamanan sinyal dari ancaman penyalahgunaan sinyal untuk kepentingan yang tidak bertanggung jawab dengan cara menutup/memutuskan frekuensi.
- (2) Pengamanan gelombang frekuensi (*jamming*) dilakukan berdasarkan hasil identifikasi pada kegiatan Pemerintah Daerah yang berpotensi timbulnya ancaman penyalahgunaan sinyal.

Pasal 36

- (1) Kontra penginderaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, merupakan upaya melakukan deteksi dari pengawasan oleh pihak yang tidak berwenang pada objek ruang tertentu.
- (2) Kontra penginderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada objek ruang milik Pemerintah Daerah yang dilakukan untuk melakukan komunikasi terkait informasi yang harus diamankan.
- (3) Pelaksanaan kontra penginderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara berkala.
- (4) Temuan hasil kontra penginderaan berupa barang yang diduga menjadi peralatan penginderaan (*surveillance*) dapat dikonsultasikan ke Badan Siber dan Sandi Negara.
- (5) Hasil pelaksanaan kontra penginderaan harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Persandian.

Pasal 37

- (1) Penilaian keamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf (c), merupakan upaya untuk mengukur tingkat kerawanan dan keamanan dari sistem informasi di Pemerintah Daerah.
- (2) Penilaian keamanan sistem informasi dilakukan pada sistem informasi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penilaian keamanan sistem informasi berkoordinasi ke Badan Siber dan Sandi Negara.
- (4) Hasil pelaksanaan penilaian keamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Persandian.

BAB V LAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 38

- (1) Layanan Sertifikat Elektronik di Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjamin keutuhan, otentikasi dan nirsangkal Dokumen Elektronik.
- (2) Layanan Sertifikat Elektronik dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah jika memenuhi persyaratan dan telah diberikan kewenang oleh Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap aparatur sipil negara Pemerintah Daerah dapat memiliki Sertifikat Elektronik yang dapat digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan.
- (4) Kepemilikan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), difasilitasi oleh PD pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.
- (5) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pengiriman dan pembuatan surat elektronik (*email*);
 - b. pembuatan dokumen persuratan elektronik; dan/atau
 - c. pembuatan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan sistem elektronik.
- (6) Aplikasi dan Sistem Elektronik yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas harus memanfaatkan layanan Sertifikat Elektronik dalam rangka pengamanan informasi.

Pasal 39

- (1) Proses pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan verifikasi identitas dan berkas untuk pendaftaran, pembaharuan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - b. pengembangan aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - c. fasilitasi kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait sertifikat elektronik; dan
 - d. pengawasan dan evaluasi penggunaan sertifikat elektronik.
- (2) Pelaksanaan verifikasi identitas dan berkas untuk pendaftaran, pembaharuan dan pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. menangani verifikasi identitas berdasarkan identitas resmi, keanggotaan pada instansi dan rekomendasi dari instansi;
- b. menyetujui/menolak permintaan pendaftaran sertifikat elektronik;
- c. menindaklanjuti permintaan Sertifikat Elektronik kepada Badan Sertifikat Elektronik (BsrE);
- d. menyampaikan sertifikat elektronik kepada pemohon; dan
- e. melakukan pengarsipan berkas pendaftaran Sertifikat Elektronik (*hardcopy* dan *softcopy*).

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 40

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan terhadap penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah.
- (2) PD pelaksana urusan Pemerintahan di bidang Persandian melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) PD pelaksana urusan Pemerintahan di bidang Persandian menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 41

Pendanaan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Kabupaten Gunung Mas bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 29 Maret 2022

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 29 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

TTD

YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2022 NOMOR 597

**Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



ERDISITO, SH

Pembina (IV/a)

NIP. 19700617 200501 1 007